

II . TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf Hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan rill perkapita (Soeparmok, 2001:5).

Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, pembangunan harus dipahami sebagai salah satu proses yang berdimensi jarak yaitu melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, seluruh rakyat dan kelembagaan nasional serta percepatan pembangunan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan, kemiskinan absolute (Todaro,1999:29).

Pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2000).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini

menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu:

- a) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
- b) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
- c) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. (Arsyad:1999).

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha memperbesar pendapatan perkapita dan menekan produktivitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill, atau pembangunan ekonomi adalah menambah skill agar satu sama lainnya membawa pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

(Djojohadikusumo:1994).

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Istilah perencanaan pembangunan ekonomi lebih didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup suatu keputusan-keputusan sebagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Lincoln Arsyad) Ciri-ciri dari perencanaan pembangunan ekonomi:

- Usaha-usaha dicerminkan dalam rencana yang mantap, Hal ini dicerminkan dalam usaha-usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- Usaha-usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- Usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja.

- Usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan.
- Usaha-usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Secara umum fungsi-fungsi perencanaan pembangunan ekonomi menurut (Lincoln Arsyad).

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahannya kegiatan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi ekonomi.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mencari yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukannya penyusunan skala prioritas dari tujuan.

Perencanaan sebagai alat untuk mengukur dan pengawasan evaluasi.

2. Teori Pembangunan seimbang menurut Rosenstein-Rodan dan Nurkse

Industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah berkembang. Rendahnya investasi disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan rendahnya daya beli masyarakat disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat itu sendiri. Rendahnya pendapatan riil dikarenakan oleh rendahnya produktivitas.

3. Teori pembangunan tidak seimbang menurut Hirschman dan Streeten

Ketidak seimbangan pembangunan adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara berkembang.

Hirschman juga mengamati bahwa proses pembangunan yang terjadi antara dua periode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (*leading sector*) akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri lain yang erat kaitannya dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut. Sementara pembangunan yang tidak seimbang akan menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan - ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melakukan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan

Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional/PN (Tambunan, 2001).

1. Model Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis, agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi mudah dipahami, maka dibedakan dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup GDP total dan pertumbuhan penduduk.

2. Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena

tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu; angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat

3. Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi

Keseimbangan pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di antara wilayah dalam suatu negara kesatuan, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan PDRB perkapita antar wilayah, terjadinya keseimbangan pertumbuhan ekonomi memiliki hambatan yaitu tidak semua wilayah memiliki faktor – faktor pendukung untuk memajukan wilayahnya sendiri

1. Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis

Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi dua yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain. Selain itu disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (*pecunary external economics*) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.

Menurut Arthur Lewis pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Terjadinya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.

C. Perubahan Struktur Ekonomi (Transformasi Struktural)

Pada pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara terus menerus akan menyebabkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural adalah pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor

industri atau jasa – jasa yang dimana pada setiap sektor terjadi perubahan transformasi yang berbeda - beda.

Proses perubahan struktur ekonomi juga terkadang disebut perubahan ke sektor industrial. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor dan kesempatan kerja.

Struktur ekonomi yang umum disebut dengan transformasi struktural diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi Agregat Demand, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), Agregat Supply (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Chenery :2001)

Pada pembangunan perekonomian wilayah transformasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi. Jika telah terjadi transformasi ekonomi, dapat dikatakan bahwa pada wilayah tersebut telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah dalam upaya pengembangan, tetapi jika tidak terjadi proses transformasi maka pemerintah suatu wilayah perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, dalam upaya penyempurnaan kebijakan pembangunan yang disusun menjadi lebih terarah agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

1. Faktor Penyebab Transformasi Struktural

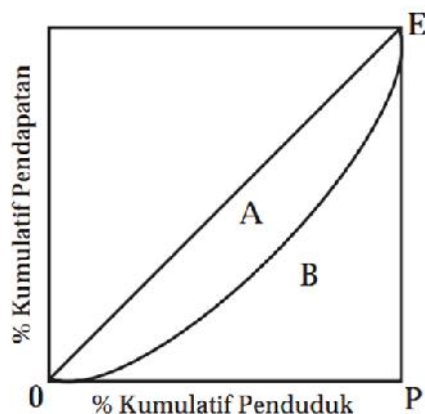
Faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi yang pertama adalah disebabkan oleh sifat masyarakat dalam konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi bertambah besar. Maka dari itu peranan sektor industri akan semakin besar dibandingkan sektor pertanian. Kedua, perubahan struktur ekonomi disebabkan oleh perubahan teknologi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses transformasi struktural akan berjalan cepat jika terjadi pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur.

D. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk tujuan analisis (Todaro dan Smith, 2006). Dua ukuran yang pada umumnya digunakan dalam menganalisa distribusi pendapatan tersebut adalah *size distribution of income* (distribusi ukuran pendapatan) dan *functional or factor share distribution of income* (distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi). *Size distribution of income* secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Berdasarkan ukuran ini, cara mendapatkan penghasilan tidak dipermasalahkan, apa yang lebih diperhatikan dari ukuran ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya. Selain itu, lokasi sumber

penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan. Sedangkan *functional or factor share distribution of income* berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan nasional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini.

Guna mengukur ketimpangan pendapatan di antara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan pada ukuran *size distribution of income*. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan atau distribusi. Pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan. Terkait dengan hal tersebut, pengukuran menggunakan indeks gini dan kurva lorenz .

Kurva Lorenz :**Indeks Gini :**

$$G = 1 - \left\{ \sum P_i(Q_i + Q_{i-1}) \right\}$$

Keterangan =

G = Indeks Gini

1 = Konstanta

P_i = persentase jumlah penduduk

$Q_i + Q_{i-1}$ = persentase kumulatif rata-rata pengeluaran per kapita

(Todaro dan Smith, 2006).

Ide dasar perhitungan koefisien Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Kurva tersebut dinamakan kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut:

- Lebih kecil dari 0.4: tingkat ketimpangan rendah
- Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat
- Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi

Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:

40 % penduduk berpendapatan terendah Penduduk termiskin

40 % penduduk berpendapatan menengah

20% penduduk berpendapatan tinggi

KLASIFIKASI :

Ketimpangan Parah = distribusi pendapatannya 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional

Ketimpangan Sedang = distribusi pendapatannya 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional

Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata) = 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional.

Hubungan Ketidakmerataan Pendapatan dengan Tingkat Pendapatan diuji dengan menggunakan Analisis Regresi Kuadratik (*quadratic regression analysis*); ketimpangan distribusi pendapatan (diukur dengan angka Indeks

Gini) sebagai peubah tidak bebas (*dependent variable*) dan pendapatan perkapita sebagai peubah bebas (*independent variable*).

E. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

PDRB perkapita. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Indikator pendapatan perkapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal

di suatu wilayah (wilayah penghitungan PDRB), akan diperoleh angka PDRB per kapita.

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal

dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi. Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat digunakan salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB = C + I + G + (x - m)}$$

Dimana C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pembentukan modal, G adalah pengeluaran pemerintah, dan (x - m) adalah selisih nilai ekspor dan impor. perlu disepakati bahwa I (investasi) dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). G adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.

Untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat diketahui melalui pendekatan model pertumbuhan neo klasik dengan memusatkan perhatian pada fungsi produksi cobb-douglas.

Menurut arsyad (1999:63) fungsi produksi cobb-douglas tersebut dapat dituliskan dengan cara berikut:

$$qt = tta kt ltb$$

Dimana q = tingkat produksi, t = tingkat teknologi, k = jumlah modal, l = jumlah tenaga kerja, dan t = tahun tertentu.

Dalam penghitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi. Ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional. Pembagian ini sesuai dengan *System of National Accounts* (SNA). Hal ini juga memudahkan para analis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antara PDRB dengan PDB.

F. Teori Kemiskinan

Pada tahun 1990, *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, *World Bank* menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “*Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan*

datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Definisi kemiskinan lainnya juga dapat didasari pada jenis kemiskinan secara konseptual yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006). Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, maka penduduk dikatakan miskin secara absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

1. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, terdapat tiga ukuran yang menjadi indikator kemiskinan, yaitu:

a. Ukuran *poverty incidence*

Ukuran ini menggambarkan kemiskinan dalam suatu masyarakat.

Indikator kemiskinan dengan ukuran ini ditunjukkan dari *Head Count*

Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah

Garis Kemiskinan (GK). Namun, ukuran ini mempunyai beberapa

kelemahan yaitu tidak dapat melihat jurang atau *degree* kemiskinan, secara implisit mengasumsikan distribusi yang merata antar si miskin, dan antar waktu tidak terdeteksi transfer dari si miskin ke si kaya.

b. Ukuran *poverty gap*

Ukuran ini menggambarkan seberapa jauh jurang pendapatan si miskin

dengan Garis Kemiskinan. Kemiskinan dengan ukuran ini ditunjukkan dari

Poverty Gap Index (Indeks Kedalaman Kemiskinan-P1) yang merupakan

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan. Namun,

dengan ukuran ini tidak tergambar jumlah si miskin, dan tidak terdeteksi

distribusi antar si miskin yang lebih timpang.

c. Ukuran *poverty severity*

Ukuran ini menunjukkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan member bobot yang lebih tinggi bagi *poverty gap* yang lebih miskin dibandingkan yang kurang miskin. Indikator kemiskinan dengan ukuran ini ditunjukkan oleh *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Namun ukuran ini tidak terlihat jumlah si miskin.

G. Hubungan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan

per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu : (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana:2000).

Namun sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat luas, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidaklah semata-mata hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau PDRB, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat. Karena

ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat juga merupakan permasalahan pembangunan (Arsyad:1997).

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga.

Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh, adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya. Dengan demikian jika mencermati pengertian tersebut maka upaya mengharmonisasikan tujuan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang dipilih atau yang dijalankan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah melalui serangkaian intervensi kebijakan pembangunan memiliki arti strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

H. Hubungan antara Pertumbuhan dan Ketimpangan Pendapatan.

Terkait dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, telah banyak studi empiris yang dilakukan untuk menguji hipotesis Kuznets dengan menggunakan data makro dari sejumlah negara. Dari studi-studi empiris yang dilakukan tersebut, Tambunan (2001)

menyatakan tiga catatan penting. *Pertama*, sebagian studi yang dilakukan menolak hipotesis Kuznets. Studi empiris yang dilakukan Ravallion dan Datt (1996) terhadap India menunjukkan bahwa selama periode 1950-an hingga 1990-an pendapatan rata-rata per kapita meningkat dan kecenderungan perkembangan tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan sudut yang negatif (menurun).

Hasil analisa yang dilakukan Ravallion (2001) terhadap 47 negara sedang berkembang juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan ketimpangan. Analisa terhadap 60 negara sedang berkembang yang dilakukan oleh Adams (2004) juga menunjukkan bahwa GDP per kapita tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. *Kedua*, walaupun secara umum hipotesis ini diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok negara-negara industri maju (kelompok negara-negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi). *Ketiga*, bagian kesenjangan dari kurva Kuznets (bagian kiri) cenderung lebih tidak stabil dibandingkan porsi kesenjangan menurun dari kurva tersebut (bagian kanan).

Kesenjangan cenderung menurun untuk negara-negara pada tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejak bagian kesenjangan dari kurva tersebut terdiri dari negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah maka relasi itu lebih tidak stabil untuk negara-negara tersebut.

Perkembangan terakhir dari penelitian-penelitian mengenai pembangunan ekonomi, tidak lagi berfokus pada berlaku atau tidaknya hipotesa Kuznets, tapi lebih kepada pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dengan kemungkinan terjadi peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang mengurangi efektifitas dari pengurangan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh Wodon (1999).

I. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi dimana tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum untuk hidup layak. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ketika perekonomian berkembang atau mengalami pertumbuhan di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), berarti terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk di kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan akibat adanya pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan perubahan distribusi pendapatan yang terjadi.

Guna memahami dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, maka diperlukan adanya perhitungan secara terpisah terhadap pengaruh pada kemiskinan akibat dari adanya perubahan rata-rata pendapatan dan distribusinya. Dengan kata lain, diperlukan adanya dekomposisi perubahan total kemiskinan ke dalam dua hal yaitu:

- a. Sebagai dampak dari pertumbuhan ketika distribusi pendapatan tidak berubah (ketimpangan konstan)
- b. Sebagai pengaruh dari redistribusi ketika pendapatan total tidak berubah (ketimpangan berubah)

J. Hubungan pembangunan ekonomi dan perubahan struktural

Struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Tulisan A.G.B. Fisher dalam *International Labour Review* pada tahun 1935 telah mengemukakan pendapat bahwa berbagai negara dapat dibedakan berdasarkan persentase tenaga kerja yang berada di sektor primer, sekunder dan tersier. Pendapat ini dibuktikan oleh Clark yang telah mengumpulkan data statistik mengenai persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor primer, sekunder dan tersier di beberapa negara.

Data yang dikumpulkannya itu menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Akan tetapi sebaliknya, sektor industri makin penting perannya dalam menampung tenaga kerja. Kuznets menunjukkan perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional, sedangkan Chenery mengkhususkan analisisnya pada corak perubahan sumbangan berbagai sektor dan industri-industri dalam sub-sektor industri pengolahan kepada produksi nasional.

K. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Dalam Negeri

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Januardy A.J. Hidayat	Analisis Struktur Perekonomian Kota Manado (2013)	Analisis Deskriptif <i>Location Quotient (LQ)</i> , <i>Shift Share</i>	Terjadi perubahan struktur ekonomi di Kota Manado, dimana terjadi peningkatan dan perubahan pada struktur ekonomi Kota Manado dilihat dari sisi sektor ekonomi yaitu dari 4 sektor ekonomi unggulan meningkat menjadi 5 sektor ekonomi unggulan bertambah dengan adanya sektor pengangkutan dan komunikasi
2	Hj.Jamaliah	Analisis Struktur Ekonomi serta Basis Ekonomi DiProvinsi Kalimantan Barat	Location Quotient (LQ) Analisis Deskriptif	Kontribusi terbesar ialah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan. Pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 1998-2008
3	Sri Kusreni	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Spesialisasi Sektoral dan Wilayah Serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Untuk Daerah Perkotaan di Jawa Timur (2009)	Analisis Deskriptif <i>Structural Equation Model (SEM)</i> , SPSS	Pengaruh perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap fungsi spesialisasi dan struktur penyerapan tenaga kerja sektoral untuk daerah perkotaan di Jawa Timur. cukup besar jumlahnya dan setiap tahun selalu meningkat baik karena faktor demografis yaitu bertambahnya penduduk yang masuk dalam usia kerja

				<p>maupun mobilitas dari luar Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor tertier yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sub sektor Transpotasi dan Komunikasi, sub sektor Keuangan dan Persewaan, dan sub sektor Jasa, hal ini bisa dimengerti karena kehidupan kota pada umumnya lebih bersifat pelayanan</p>
--	--	--	--	--